### KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Pelayanan Jasa Surat-Menyurat Dan Kearsipan Anggaran Tahun 2019 : Rp.238.390.000,00

Unit Kerja : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### LATAR BELAKANG

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama yang merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro, Sub Bagian Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sebagai berikut :

* 1. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan
	2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip/laporan/data lain di lingkungan Biro
	3. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Biro
	4. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
	5. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya
	6. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di lingkungan Biro
	7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro
	8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro
	9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha Biro merencanakan kegiatan Pelayanan Jasa Surat-Menyurat Dan Kearsipan yang ruang lingkup kegiatannya adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk optimalisasi pelayanan surat lingkup Biro serta menertibkan arsip-arsip dokumen Biro untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dan sebelum diserahkan ke Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

1. Tujuan
	1. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan jasa surat-menyurat dan kearsipan.
	2. Sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pelayanan jasa surat-menyurat dan kearsipan lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama serta Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

### KELUARAN DAN HASIL

1. Keluaran
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak Dan Operasional Pendukung Surat-Menyurat Dan Kearsipan selama 12 bulan.
3. Penertiban Administrasi Barang Dan Keuangan melalui penertiban penatausahaan keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu serta administrasi barang milik daerah melalui Pembantu Pengurus Barang selama 12 bulan.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Dan Pelaporan Biro meliputi penggandaan dokumen-dokumen Perencanaan, Pengendalian, Dan Pelaporan selama 12 bulan.
5. Pembuatan 1 website Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama yang memuat informasi sesuai standar PPID dan memuat arsip berupa *web document* yang terintegrasi dengan *website* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan PPID Sekretariat Daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi organisasi perangkat daerah.
6. Hasil

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama 100%.

### Æ. RUANG LINGKUP

1. Uraian Dan Batasan Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat-Menyurat Dan Kearsipan meliputi penyediaan alat tulis kantor, bahan cetak dan operasional pendukung surat-menyurat dan kearsipan, pengadministrasian barang milik daerah dan penatausahaan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pembuatan *website* Biro yang terbatas pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

1. Tahapan, Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | TAHAPAN | TAHUN 2019 | TEMPAT |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1 | Persiapan | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Semarang |
| 2 | PenyediaanATK & Barang Cetak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Semarang |
| 3 | Adm BMD & Penatausahaa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Semarang |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Penyusunan Dok Perencanaan,Pengendalian, Pelaporan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Semarang |
| 5 | Pembuatan*Website* |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Semarang |
| 6 | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Semarang |

1. Sumber Pendanaan

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp.238.390.000,00 sebagaimana RAB terlampir.

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### Ø. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002